



Berbagai Inisiatif REDD+ Subnasional

Berbagai Inisiatif REDD+ Subnasional mencermati bagaimana inisiatif REDD+ dapat dirancang dan diimplementasikan sehingga hasilnya akan efektif, efisien dan berkeadilan serta menghasilkan manfaat tambahan.

Walaupun REDD+ masih dinegosiasikan di arena internasional, sekitar 200 inisiatif karbon hutan di tingkat subnasional sudah berjalan di seluruh dunia.¹ Berbagai intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan cadangan karbon hutan yang dibandingkan dengan skenario bisnis seperti biasa (yaitu, skenario jika intervensi tidak dilakukan).

Bagaimana kemungkinan keberhasilan berbagai intervensi tersebut? Apakah hasilnya akan efisien, berkeadilan dan efektif? Akankah mereka menghasilkan manfaat tambahan seperti peningkatan penghidupan dan perlindungan penguasaan lahan dan keanekaragaman hayati? Kondisi dan kegiatan apa sajakah yang mendukung atau menghambat inisiatif-inisiatif ini dalam mencapai tujuannya? Bagaimana mereka dapat memperoleh dukungan yang diperlukan dari masyarakat setempat?

Untuk membantu menjawab pertanyaan ini, kami mengumpulkan dan menganalisis data acuan sosial-ekonomi dan biofisik di 23 lokasi REDD+ di enam negara, yang mencakup lebih dari 170 desa dan hampir 4.500 rumah tangga. Untuk memastikan bahwa dampak yang dihasilkan sesuai dengan inisiatif-inisiatif, kami membandingkan data sebelum dan sesudah intervensi, serta data dengan atau tanpa intervensi.^{2,3}

Studi Komparatif Global tentang REDD+
ForestsClimateChange.org



Berbagai Inisiatif REDD+ Subnasional

Hal-hal Penting

Pentingnya penguasaan lahan yang terjamin dan jelas

Untuk mendapatkan hasil yang efektif, efisien dan berkeadilan, hak-hak terkait penguasaan atas hutan, pohon dan karbon pohon harus jelas.⁴ Untuk mengalokasikan insentif REDD+, siapa yang berhak mendapatkan manfaat haruslah jelas.⁵ Apabila masyarakat lokal memiliki jaminan atas hak mereka, mereka termotivasi untuk mengelola lahan secara berkelanjutan. Jika tidak, mereka mungkin enggan melakukan investasi jangka panjang; beberapa bahkan mungkin membuka lahan sebagai cara untuk menyatakan klaim mereka.⁴ Sebagian yang lain mungkin menolak REDD+ jika mereka khawatir bahwa akan lebih banyak pihak luar yang mengambil alih lahan mereka.⁶ Penguasaan lahan yang jelas juga melindungi hak dan penghidupan masyarakat serta dapat mencegah pemanfaatan sumber daya secara tergesa-gesa ketika nilai hutan meningkat.⁷

Masalah penguasaan lahan sedang naik daun

Di sebagian besar negara REDD+, penguasaan lahan bersifat ambigu dan saling dipertentangkan – dan oleh karena itu, belum terjamin. Dalam sebuah analisis di desa-desa di lima negara, lebih dari separuh responden mengatakan bahwa penguasaan lahan mereka belum terjamin.⁷ Sebuah analisis di sejumlah lokasi di Indonesia mendapatkan bahwa kondisi penguasaan lahan yang ada tidak memadai untuk mengimplementasikan REDD+ secara efektif.⁸ Bahkan di Brasil, yang penguasaan lahannya dianggap cukup memadai, ketidakpastian penguasaan lahan ternyata banyak menimpa rumah tangga.⁹

Penguasaan lahan membutuhkan perbaikan pada tingkat nasional

Para pemrakarsa inisiatif mencoba untuk menyelesaikan isu-isu penguasaan lahan, misalnya dengan menindaklanjuti penyebab konflik, menandai batas melalui pemetaan, mengembangkan rencana tata ruang pemanfaatan lahan, mengidentifikasi pemegang hak legal dan mencatatkan hak milik lahan.⁷ Namun demikian, mereka terhambat karena cakupan dan sumber masalah penguasaan lahan bersifat nasional.^{7,11} Aksi penguasaan lahan nasional memang diperlukan, namun masih terbatas.⁴ Sejumlah hambatannya antara lain adalah keterbatasan kapasitas untuk demarkasi dan pencatatan status lahan, kepentingan mereka yang bersaing untuk lahan dan sumber daya, dan penghambat-penghambat ideologis.⁴ Integrasi upaya-upaya penguasaan lahan nasional dan lokal juga dibutuhkan, termasuk klarifikasi kebijakan REDD+ di tingkat internasional dan nasional, serta pengembangan mekanisme resolusi konflik.⁷

Bagi penduduk desa, penghidupan adalah yang terpenting

Survei menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa di sekitar lokasi REDD+ berharap bahwa inisiatif akan meningkatkan penghasilan dan penghidupan mereka, namun mereka khawatir kebijakan ini akan merugikan atau membatasi akses mereka ke sumber daya.¹² Banyak yang menyatakan bahwa mereka lebih berminat untuk meningkatkan penghasilan dibandingkan melindungi hutan demi kebaikan hutan sendiri. Misalnya, suatu studi di Indonesia menemukan bahwa minat rumah tangga untuk melindungi hutan sangat kecil, kecuali jika tindakan ini menguntungkan penghidupan mereka.⁸ Temuan ini menunjukkan bahwa REDD+ akan menjadi efektif hanya jika dapat bersaing secara ekonomis dengan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan gas rumah kaca. Inisiatif REDD+ harus menyeimbangkan perlindungan hutan dengan persoalan kesejahteraan penduduk desa dan melindungi mata pencaharian pertanian.¹³

Penduduk desa ingin – dan seharusnya – dilibatkan

Penduduk desa yang disurvei¹² ingin terlibat dan berpartisipasi secara berarti dalam inisiatif REDD+. Mereka juga ingin para pemrakarsa berkomunikasi dengan lebih baik, menunjukkan transparansi yang lebih luas, serta menghormati dan mendukung hak-hak mereka;¹² harapan ini mencerminkan beberapa jaring pengaman UNFCCC.¹⁴ Namun ternyata ditemukan bahwa pengetahuan penduduk desa tentang REDD+ dan/atau inisiatif REDD+ lokal umumnya rendah.¹² Kebanyakan inisiatif-inisiatif memiliki beberapa kegiatan untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari penduduk desa, namun tidak semuanya berhasil dan beberapa pemrakarsa, menunda pembelajarannya.⁷ Pemrakarsa harus menginformasikan tentang REDD+ kepada penduduk desa dengan lebih baik dan melibatkan mereka dalam rancangan inisiatif dan implementasinya.

Inisiatif REDD+ harus menyeimbangkan perlindungan hutan dengan persoalan kesejahteraan masyarakat dan melindungi mata pencaharian pertanian.

Kejelasan penguasaan lahan melindungi hak-hak masyarakat dan penghidupan mereka serta dapat mencegah pemanfaatan sumber daya yang tergesa-gesa ketika nilai hutan meningkat.



Negara yang diteliti

- Brasil
- Kamerun
- Indonesia
- Peru
- Tanzania
- Vietnam

Masalah penguasaan lahan secara umum^{4,7,10}

- perambahan
- persengketaan
- persaingan tanah
- kemudahan untuk mencabut hak
- pendaftaran lahan yang kadaluarsa
- pembatasan pemerintah atas pemanfaatan lahan
- pembatasan perusahaan atas pemanfaatan lahan
- kesenjangan antara hak-hak adat yang diyakini dan hak-hak yang resmi
- tumpang tindih kepemilikan atau klaim atas lahan
- penyerobotan
- konflik
- perampasan oleh para petinggi
- kurangnya pencatatan tentang status lahan

Diskusi internasional memengaruhi tindakan lokal

Kurangnya kejelasan tentang arah REDD+ menimbulkan ketidakpastian, khususnya terkait apakah pembayaran untuk jasa lingkungan (PES) – inti dari kebijakan REDD+ – akan terwujud. Keterlambatan dalam negosiasi internasional menghambat implementasi inisiatif. Rancangan inisiatif cenderung mengkombinasikan PES dengan pendekatan-pendekatan konservasi yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga para pemrakarsa dapat segera memulai dan memiliki pilihan yang dapat digunakan, namun model yang lama memiliki sejarah mengenai beberapa permasalahan.¹⁵ Beberapa pemrakarsa menunda upaya-upaya untuk terlibat penuh dan mendidik warga desa, untuk menghindari bertumbuhnya harapan seandainya manfaat REDD+ tidak terwujud.⁷ Lebih jauh lagi, ketika (atau jika) REDD+ telah berjalan sepenuhnya, isu-isu tambahan terkait penguasaan lahan kemungkinan akan muncul, yang saat ini hanya dapat diperkirakan oleh para pemrakarsa.⁷ Selain itu, jaring pengaman sosial harus diselesaikan pada tingkat internasional untuk memunculkan tindakan nyata.¹³



Daftar Pustaka

- 1 Kshatriya M, Sills EO dan Lin L. 2011. *Global database of REDD+ and other forest carbon projects*. Interactive map. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- 2 Sunderlin WD, Larson AM, Duchelle A, Sills EO, Luttrell C, Jagger P, Pattanayak S, Cronkleton P dan Ekaputri AD. 2010. *Technical Guidelines for Research on REDD+ Project Sites with Survey Instruments and Code Book*. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- 3 Jagger P, Sills E, Lawlor K dan Sunderlin WD. 2010. *A Guide to Learning about Livelihood Impacts of REDD+*. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- 4 Larson A, Brockhaus M dan Sunderlin WD. 2012. Tenure matters in REDD+: Lessons from the field. Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, eds. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 153–75.
- 5 Luttrell C, Loft L, Gebara MF dan Kweka D. 2012. Who should benefit and why? Discourses on REDD+ benefit sharing. Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, eds. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 129–52.
- 6 Larson A dan Petkova E. 2011. An introduction to forest governance, people and REDD+ in Latin America: Obstacles and opportunities. *Forests* 2(1): 86–111.
- 7 Sunderlin WD, Larson AM, Duchelle AE, Resosudarmo IAP, Huynh Thu Ba, Awono A dan Dokken T. 2013. How are REDD+ proponents addressing tenure problems? Evidence from Brazil, Cameroon, Tanzania, Indonesia, and Vietnam. *World Development* doi: 10.1016/j.worlddev.2013.01.013.
- 8 Resosudarmo IAP, Atmadja S, Ekaputri AD, Intarini DY, Indriatmoko Y dan Astri P. 2013. Does tenure security lead to REDD+ effectiveness? Reflections from five emerging sites in Indonesia. *World Development* doi: 10.1016/j.worlddev.2013.01.015.
- 9 Duchelle AE, Cromberg M, Gebara MF, Guerra R, Melo T, Larson AM, Cronkleton P, Borner J, Sills E, Wunder S, Bauch S, May P, Selaya G dan Sunderlin WD. 2013. Linking forest tenure reform, environmental compliance, and incentives: Lessons from REDD+ initiatives in the Brazilian Amazon. *World Development* doi: 10.1016/j.worlddev.2013.01.014.
- 10 Sunderlin WD, Larson AM dan Cronkleton P. 2009. Forest tenure rights and REDD+: From inertia to policy solutions. Dalam Angelsen A with Brockhaus M, Kanninen M, Sills E, Sunderlin WD and Wertz-Kanounnikoff S, eds. *Realising REDD+: National Strategy and Policy Options*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 139–49.
- 11 Sunderlin WD. 2011. The global forest tenure transition: Background, substance and prospects. Dalam Sikor T dan Stahl J, eds. *Forests and People: Property, Governance and Human Rights*. London: Earthscan. 19–32.
- 12 Resosudarmo IAP, Duchelle A, Ekaputri AD dan Sunderlin WD. 2012. Local hopes and worries about REDD+ projects. Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, eds. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 193–208.
- 13 Lin L, Pattanayak SK, Sills EO dan Sunderlin WD. 2012. Pemilihan lokasi untuk proyek karbon hutan. Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, eds. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 210–30.
- 14 Jagger P, Lawlor K, Brockhaus M, Gebara MF, Sonwa DJ dan Resosudarmo IAP. 2012. REDD+ safeguards in national policy discourse and pilot projects. Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, eds. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 301–16.
- 15 Sunderlin WD dan Sills EO. 2012. REDD+ projects as a hybrid of old and new forest conservation approaches. Dalam Angelsen A, Brockhaus M, Sunderlin WD dan Verchot L, eds. *Analysing REDD+: Challenges and Choices*. Bogor, Indonesia: CIFOR. 177–91.

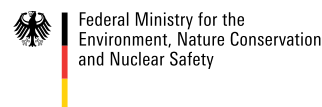
Foto oleh:

Thomas Munita (sampul), Ollivier Girard, Neil Palmer, Marco Simola

Disusun sebagai bagian dari:



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani



Maret 2014

cifor.org | blog.cifor.org



Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang membantu membentuk kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR adalah anggota Konsorsium CGIAR. Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

